

LKPD

TTS APBN & APBD



Isilah teka teki dibawah ini sesuai dengan pertanyaannya kemudian tulis nama kelompok dan anggota kelompok kalian

Secara horizontal

5. Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah
7. Salah satu sumber pengeluaran pusat
9. Penerimaan negara terbesar
10. Pihak yang mengesahkan/menolak RAPBN

Tegak lurus

1. Salah satu bentuk pajak tak langsung
2. Kondisi ketika pengeluaran lebih besar dibanding penerimaan
3. Salah satu sumber penerimaan pajak
4. Kondisi ketika penerimaan lebih besar dibanding pengeluaran
6. Bantuan dari pihak lain yang tidak perlu dikembalikan
8. Pihak yang mengesahkan/menolak rancangan daerah tentang APBD



Nama Kelompok / Kelas



Silahkan baca berita berikut ini kemudian selesaikan pertanyaan di bawahnya

Sri Mulyani soal PPN 12 Persen di 2025: APBN Harus Dijaga Kesehatannya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 masih sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ia juga menegaskan belum ada pembahasan pemberlakuan kenaikan pajak akan ditunda. Meski banyak perdebatan menaikkan pajak di tengah pelemahan daya beli, Sri Mulyani mengingatkan APBN sebagai instrumen penyerap kejut (shock absorber) perekonomian harus dijaga kesehatannya.

"APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya karena APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon dalam episode global financial crisis. Countercyclical tetap harus kita jaga," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (13/11)

Namun, ia menekankan sangat setuju dengan masukan anggota Komisi XI DPR RI bahwa memang perlu pendekatan dengan masyarakat, terutama kelas bawah untuk menjelaskan bahwa pajak dibutuhkan demi menjalankan program yang telah disusun di APBN dan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan.

Pemerintah pun dikatakan tidak menetapkan kebijakan secara membabi buta memungut pajak ke semua lapisan masyarakat. Ada kelompok yang mendapatkan diskon bahkan hingga bebas pajaknya.

"Jadi kami disini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian, sudah ada UU nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik, bukannya membabi buta," jelasnya.

Dalam UU HPP, kata Ani, ada banyak sektor yang dibebaskan pajaknya yakni kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan hingga jasa keuangan.

Selain itu, untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak dengan penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

"Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan bahkan makanan pokok. Waktu itu debatnya panjang di sini," pungkasnya.

LKPD

SOLVING



Silahkan jawab pertanyaan berikut sesuai dengan berita di atas

Bagaimana kebijakan pajak yang diterapkan berdasarkan berita tersebut?

Bagaimana pendapat kalian terkait pajak yang diterapkan pemerintah?

BAGAIMANA

PERASAAN

KALIAN?

